

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya perlu ditingkatkan. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah Pengidap HIV dari tahun sebelumnya. Faktor yang menjadi permasalahan tersebut terjadi adalahnya :
  - a. Kebijakan Pencegahan Penularan Kasus HIV/AIDS oleh Pemerintah Kota Surabaya belum ada pembaruan yakni masih menggunakan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015.
  - b. Strategi Penanggulangan Pencegahan Penularan masih menggunakan pola dan cara – cara konvensional serta tidak mengikuti perkembangan fenomena yang ada.
  - c. Surabaya belum memiliki Shelter khusus bagi pengidap HIV/AIDS
  - d. Minimnya pemaksimalan media dalam melakukan edukasi dan pemberian informasi mengenai penularan HIV.
2. Pengembangan Pencegahan Penularan Kasus HIV/AIDS di Surabaya dengan konsep Penta Helix Model belum terlaksana dengan baik. Lembaga Swadaya Masyarakat perannya belum dimaksimalkan dan terkesan dibatasi untuk sekedar memberikan masukan tentang pencegahan penularan kasus HIV/AIDS. Belum adanya partisipasi dan Kerjasama antara Dinas Kesehatan Surabaya dengan akademisi, Media dan Swasta untuk memaksimalkan peranan dari masing – masing stakeholder dalam melakukan pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya.
3. Pencegahan Penularan Kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya belum memiliki Kerjasama dengan media sebagai wadah untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat serta mempublikasikan program –

program yang dimiliki oleh Dinkes Kota Surabaya dalam rangka pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya

4. Dinas Kesehatan belum memiliki kerjasama akademisi baik tingkat Universitas ataupun Civitas Akademik untuk meningkatkan penelitian dan atau memberikan perspektif pencegahan baru melalui metode serta teori ilmiah yang ada.
5. Pemanfaatan sektor bisnis atau swasta juga tidak dilaksanakan atau belum dimanfaatkan sepenuhnya. Seharusnya sektor swasta yang memiliki Dana CSR dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan penularan kasus bagi Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun dinas terkait.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan Model Penta Helix dalam pengembangan strategi pencegahan penularan HIV/AIDS di Surabaya. Model Penta Helix merupakan pengembangan dari model Quadruple Helix dengan melibatkan berbagai elemen dengan tujuan mewujudkan inovasi. Model Penta Helix didasarkan pada kolaborasi lima stakeholder (pemangku kepentingan) yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media. Adanya kolaborasi dari ke lima stakeholder yang ada dapat mewujudkan kerjasama yang sinergis. Adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat merealisasikan inovasi yang di dukung oleh berbagai pihak yang berinteraksi, yaitu :

1. Pemerintah Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai pihak yang paling berwenang dalam pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya sehingga memiliki peranan yang lebih besar daripada stakeholder lain pada model Penta Helix. Kemudian, peran pemerintah dalam pengembangan strategi pencegahan penularan kasus ini sangat sentral karena dalam pengembangan strategi diperlukan sebuah peraturan yang kemudian dirumuskan sebagai sebuah kebijakan nasional bahwa dalam proses pemerintahan. Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya perlu mengadakan sebuah inovasi seperti mengadakan perlombaan

pembuatan modul pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya. Lebih jelasnya, peran pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Regulator Sebagai pihak atau stakeholder yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengelola negara, pemerintah dapat melaksanakan peran mereka dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dalam hal ini strategis untuk memaksimalkan pencegahan penularan kasus HIV di Surabaya. Adapun regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah yaitu Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Hiv dan Aids.
  - b. Kordinator masyarakat, swasta, akademisi, dan media Sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam melakukan pencegahan penularan kasus HIV/AIDS, pemerintah harus mampu mengkordinasikan keempat stakeholder lainnya. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa semua stakeholder mampu melaksanakan peranannya dengan optimal dalam implementasi pencegahan penularan. Bentuk kordinasi yang dilakukan pemerintah dapat melalui pengadaan rapat bersama dengan semua stakeholder serta menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya.
  - c. Perencanaan dan evaluator Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan proses perencanaan strategis baik dalam jangka waktu satu tahun maupun lima tahun terkait perkembangan fenomena penularan kasus HIV/AIDS. Langkah strategis dapat berupa Dinas Kesehatan Kota Surabaya membentuk satuan tugas khusus yang ditempatkan pada daerah rawan penularan serta di berbagai posyandu yang tersebar di seluruh Kota Surabaya.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam hal ini, peran masyarakat sebagai bagian dari tim pemantau dari dan kepanjangan tangan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kemudian, Lembaga Swadaya Masyarakat ditempatkan

sebagai evaluator tim lapangan untuk dapat memberikan evaluasi metode pencegahan penularan kasus HIV/AIDS apakah telah diimplementasi dengan baik. Selain itu Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah memberikan informasi dan menyampaikan aspirasi terkait upaya pencegahan penularan kasus yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah tercapai atau tidak.

3. Swasta Peran swasta dalam pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya dapat berupa penganggaran sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat bermitra dengan perusahaan sebagai sponsorship yang dimana dana sponsor tersebut dapat digunakan untuk sosialisasi ataupun edukasi pencegahan penularan HIV. Kegiatan lainnya adalah menyediakan teknologi untuk mengembangkan pola pencegahan penularan yang dilakukan antar Stake Holder. Adapun rincian peran dari pihak swasta adalah :
  - a. Penganggaran melalui tanggung jawab perusahaan (CSR) dan Sponsorship CSR perusahaan dan sponsorship dapat dilakukan melalui pembiayaan permodalan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Kota Surabaya sebagai biaya atas pemasangan iklan dan sponsorship perusahaan pada strategi pencegahan penularan kasus HIV/AIDS. Perusahaan yang dapat berkontribusi adalah semua jenis perusahaan.
  - b. Penyedia teknologi Pengembangan dalam rangka pencegahan penularan kasus HIV/AIDS oleh Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Kesehatan Kota Surabaya membutuhkan banyak faktor pendukung salah satunya teknologi seperti Papan Reklame atau Billboard.
4. Akademisi Peran akademisi dalam rangka pencegahan penularan kasus HIV/AIDS di Surabaya adalah dengan menerapkan Tri Darma Perguruan Tinggi. Tri Darma Perguruan Tinggi adalah kewajiban akademisi dalam melakukan penelitian, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan dan

pengajaran. Lebih lanjut, peran akademisi dalam pengoptimalan website adalah :

- a. Meneliti Dalam hal ini peneliti melakukan tanggung jawabnya melalui penelitian terkait bagaimana perancangan dan pengelolaan pencegahan penularan kasus HIV/AIDS yang efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pengembangan dan pengoptimalan pencegahan penularan kasus.
  - b. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Akademisi dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya tim satuan khusus yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait cara dan langkah startegis bagaimana mengoptimalkan pencegahan penularan kasus HIV. Kemudian, akademisi berperan dalam melakukan pelatihan kepada konselor sebaya atau pegawai posyandu dan tim satuan khusus yang telah dibentuk.
5. Media Massa Untuk memaksimalkan keseluruhan langkah strategis yang telah disusun oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya, diperlukan peran media sebagai stakeholder yang berpengaruh dalam menyediakan dan memproses informasi dari dalam maupun dari luar, melakukan sosialisasi terkait regulasi yang telah dibuat, melakukan promosi dan publikasi terkait perkembangan kasus HIV/AIDS di Surabaya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dapat bekerjasama dengan media cetak maupun media elektronik yang melakukan publikasi dari setiap perkembangan kasus HIV/AIDS di Surabaya setiap harinya.